

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dandy Putra Pratama¹, Saputra Hadi², Muhammad Syaifuddin³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹²³

dandyputrapratama19@gmail.com¹

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pendidikan memiliki arah tujuan agar terealisasinya sistem pendidikan yang baik. Terwujudnya kebijakan pendidikan yang baik akan menjadikan suatu bangsa atau generasi menciptakan peradaban yang maju. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktifitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan setara dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur formulasi atau rumusan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kebijakan pendidikan yang menguntungkan banyak orang. Artikel ini membahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang implementasi kebijakan, factor yang mempengaruhinya, tujuan implementasi kebijakan serta strategi atau langkah dalam implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pendidikan merupakan pelaksanaan dari hasil rumusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi; kebijakan; pendidikan

ABSTRACT

Implementation of education policy has the aim of realizing a good education system. The realization of good educational policies will enable a nation or generation to create an advanced civilization. Implementation of education policy is one of the activities in the policy process that determines whether a policy in contact with educational stakeholders is acceptable to society. The government has the authority to regulate formulations related to policies that will be implemented. Therefore, it is hoped that the government can realize education policies that benefit many people. This article discusses the implementation of education policy. The method used in this paper is library research. This research is categorized as descriptive research, because the approach taken is through a qualitative approach. The aim of this research is to obtain information about policy implementation, the factors that influence it, the objectives of policy implementation and strategies or steps in implementing policy. The results of this research are that the implementation of education policy is the implementation of the results of formulations or policies set by the government regarding the implementation of education.

Keywords: Implementation; Policy; Education

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini menjadi factor terpenting dalam membangun sebuah peradaban. Namun nyatanya masih banyak berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari mutu tenaga pendidik, mutu lulusan hingga ke sarana dan prasarana yang belum memadai. Disini Negara punya peran penting dalam memperbaiki sistem tersebut. Karena nega mempunyai kewenangan dalam menciptakan kebjakan, baik berbetuk perundang-undangan maupun berbentuk program. Negara memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan. Kebijakan dalam pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi tercapainya pendidikan yang baik.

Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh suatu badan atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mencapat suatu tujuan pemerintahan, baik secara administratif, legislatif, maupun yudikatif.. kebijakan tersebut didasarkan pada hokum yang jelas sehingga dapat menguntungkan banyak orang. Menerapkan kebijakan pendidikan merupakan isu yang penting. Dalam menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan pendidikan, banyak factor yang harus diperhatikan.

Suatu kebijakan bisa di implementasikan, jika tahap-tahap sebelumnya sudah dilakukan dengan baik. Maka sebelum suatu kebijakan pendidikan itu diimplementasikan, kebijakan itu harusnya sudah sampai pada tahap yang layak untuk diimplementasikan. Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian, sebagus dan sebaik apapun sebuah kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti apabila formulasi atau kebijakan tersebut tidak dilanjutkan dengan proses implementasi.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Miza Nina Adlini, 2022). Studi pustaka memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data, bersifat siap pakai (*ready made*), peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan, kemudia *study pustaka* tidak dibatasi ruang dan waktu (Mestika Zed, 2014). Pengumpulan data pada penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Tentunya sumber tersbut terkait dengan topic pembahasan yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Seiring berkembangnya zaman, dunia pendidikan dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya sebuah kebijakan pendidikan merupakan salah satu jalan bagi setiap lembaga pendidikan untuk dapat

mengembangkan lembaganya dari lembaga pendidikan lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan sebagai tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, pemerintah dan swasta yang di tunjuk untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah di tentukan sebelumnya. Tindakan yang dimaksud disini adalah suatu usaha untuk mentransformasikan sebuah keputusan dalam kerja yang nyata atau aplikasi.

Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan pendidikan itu merupakan cara untuk menerapkan atau melaksanakan sebuah kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan agar dapat terwujud (Muhamis & Fadriati, 2023). Sedangkan menurut Elih Yuliah, Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut (Elih Yuliah, 2020).

Fatih, dkk juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Fatih Azza, dkk. 2021). Dengan begitu, Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat di terima oleh masyarakat. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan (Mujianto Solichin, 2015).

Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan dan Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu produk yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan pendidikan. Dalam penerapannya implementasi kebijakan, tidak hanya berurusan dengan badan administrasi yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan programnya serta taat akan kelompok yang menjadi sasarannya, akan tetapi bersangkutan dengan permasalahan politik, sosial dan ekonomi yang baik secara langsung maupun tidak dapat member pengaruh semua pihak yang melaksanakannya dan pada akhirnya akan berpengaruh pada dampak positif yang diharapkan.

2. Tujuan Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang mengatur mengenai Pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, hal ini seharusnya mempermudah perumusan serta ruang gerak bagi para praktisi Pendidikan di Indonesia untuk lebih berinovasi dan memperbaiki sistem Pendidikan agar sesuai dengan harapan Pendidikan nasional. Implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk menentukan serta menetapkan arah dari realisasi tujuan kebijakan, dalam prosesnya implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dari kebijakan

telah ditentukan atau ditetapkan, program-program yang direncanakan sudah disahkan serta dana yang dialokasikan telah turun untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Elisa Putri Kholifah, 2022).

Tujuan dari implementasi kebijakan perlu diaplikasikan sesuai dengan rencana pada prakteknya karena implementasi kebijakan tidak boleh hanya focus atau terbatas pada tingkah laku dari unit birokrasi yang bertanggung jawabkan tetapi dalam pelaksanaan program-programnya harus sesuai dengan target tujuan yang telah dibuat, akan tetapi yang lebih penting dari itu semua ialah kuatnya jaringan politik social ekonomi yang tentu memiliki pengaruh dalam perilaku semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan implementasi kebijakan Pendidikan.

3. Prinsip Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pada pengimplementasian sebuah kebijakan dibutuhkan lebih banyak keterlibatan tenaga kerja maupun kompetensi dari organisasi terkait, pengaplikasian kebijakan pada hakikatnya bersifat interaktif. Dalam hal tercapainya efektivitas implementasi kebijakan didasari pada tiga prinsip yang perlu dipenuhi yakni, yaitu: (Elisa Putri Kholifah, 2022).

- a. ketepatan kebijakan. Ketepatan yang dimaksud dalam hal ini untuk menilai sejauh mana kebijaksanaan yang sudah ada mampu memuat hal-hal guna menjadi solusi pemecahan masalah yang akan diselesaikan.
- b. kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan bentuk masalah yang akan diselesaikan sehingga akan membentuk arah yang selaras antara solusi yang ditawarkan dengan masalah yang ada, keselarasan ini akan mempermudah indentifikasi masalah dan pengelompokan masalah menurut solusi yang akan diberikan
- c. kesesuaian kewenangan Lembaga yang menciptakan kebijakan dengan karakter kebijakan yang dibuat. Yang dimaksud dalam hal ini kesesuaian wewenang dengan problem yang ditangani karena apabila Lembaganya tidak sesuai maka masalah yang di selesaikan akan kurang tepat dengan fokus Lembaga dan pemecahan tidak akan maksimal sesuai harapan yang diinginkan.

4. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara singkat, menurut Betty dalam bukunya mengatakan ada 4 proses dalam implementasi kebijakan, yaitu (Betty Karya, 2022):

a) Komunikasi

Komunikasi harus dilakukan secara jelas dan terperinci agar tidak terdapat perbedaan interpretasi atau kesalahan komunikasi. Artinya, penerapan kebijakan tersebut harus bisa diterima oleh seluruh pegawai dan harus memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Ada tiga hal yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi (Erika Nada Dewanti, 2022):

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik.
- 2) Kejelasan informasi
- 3) Konsistensi dalam menyampaikan informasi

b) Sumber daya (Resources)

Factor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan public, dalam sumber daya ini akan meliputi staf yang mendukung disertai dengan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Serta didukung informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan. Sumber daya yang dimaksud antara lain jumlah anggota, keahlian pelaksana, informasi relevan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan mengelola program sejalan dengan yang diharapkan, dan adanya fasilitas pendukung, yaitu sumber daya manusia.

c) Kecenderungan dalam bersikap (Dispositions)

Kecenderungan ini berkaitan dengan kemampuan mengeksekusi kebijakan, karena kecakapan tidak mampu memenuhi tanpa didukung kesediaan dan komitmen yang mumpuni dalam melaksanakan suatu kebijakan.

d) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi disini adalah semua instrumen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur (Sandra Wahyu Lukitasari, Bambang Suteng Sulasmono & Ade Iriani, 2017). Terdapat dua aspek struktur organisasi ini, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme biasanya dibuat dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang merupakan pedoman langkah-langkah berupa keseragaman pola dalam pelaksanaan implementasi kebijakan supaya tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan. Aspek penting lain dari struktur birokrasi adalah ada atau tidaknya fragmentasi atau perpecahan di kalangan birokrasi pelaksana kebijakan. Fragmentasi di lingkungan birokrasi pelaksana kebijakan akan membuat permasalahan dalam implementasi.

5. Strategi Dan Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang telah disusun harus disertai dengan tahap implementasi. Agar dapat di implementasikan secara optimal terdapat beberapa strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan yaitu (Elisa Putri Kholifah, 2022):

- a. Mengidentifikasi isu-isu yang harus dilaksanakan.
- b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Merancang struktur proses implementasi. Dalam menyusun struktur implementasi, beberapa hal yang harus di perhatikan, antara lain:
 - 1) Penataan organisasi atau personel pelaksana,
 - 2) Penjabaran tujuan dalam berbagai peraturan pelaksana,
 - 3) Pengkoordinasian berbagai sumber daya dan pengeluaran untuk kelompok sasaran,
 - 4) Pembagian tugas antar departemen, badan eksekutif, dan
 - 5) Mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Agar kebijakan dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kebijakan untuk implementasinya, seperti sosialisasi dan pemberdayaan semua pihak di pemerintah atau birokrasi pelaksana kebijakan pendidikan sebagai masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menyebarkan kepada masyarakat mengenai informasi melalui berbagai media dan akan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menerapkan kebijakan bebas sanksi untuk jangka waktu tertentu, dan jika perlu memperbaiki kebijakan tersebut. Penegakan kebijakan di kombinasikan dengan sanksi. Hal ini dilakukan pada akhir masa percobaan dan disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Setelah kebijakan diimplementasikan, dilakukan evaluasi kebijakan.

6) Kecukupan Dan Kelengkapan Implementasi Kebijakan

- 7) Untuk memenuhi kelengkapan dan kecukupan kebijakan pendidikan, beberapa perangkat harus diperhatikan, yaitu :

a. Hukum

Hukum adalah alat pemerintah yang paling umum digunakan. Dengan membuat undang-undang, pemerintah memiliki legitimasi untuk menegakkan suatu kebijakan dan dapat menegakkan kepatuhan terhadapnya oleh setiap warga negara

b. Pelayanan

Pelayanan kebijakan dapat berupa pemerintah yang melayani masyarakat. Akan tetapi, harus diingatkan bahwa pelayanan terbaik adalah pelayanan yang menjangkau mereka yang membutuhkan atau sesuai dengan tujuannya.

c. Dana Pajak

Pendanaan diperlukan sebagai sumber dana untuk menenagai seluruh kegiatan pelayanan dan implementasi kebijakan. Pajak adalah alat yang dikelola pemerintah yang dikembalikan kepada dan bermanfaat bagi masyarakat melalui berbagai bentuk perencanaan yang lebih baik.

d. Situasi

Jika alat di atas tidak berfungsi, situasi adalah alat yang di gunakan oleh pemerintah. Alat ini dapat memanfaatkan keyakinan moral untuk mempengaruhi masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat di terima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan bertujuan untuk menentukan posisi agar kebijakan pendidikan dapat diaktualisasikan. Pada penerapan kebijakan pendidikan ada sistem yang harus ditempuh dengan memperhatikan prinsip yang telah ditetapkan, strategi dan langkah yang harus di perhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, melihat kecukupan dan kelengkapan dalam mengimplemetasikan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina., dkk. (2022). Motode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal EDUMASPUL*. 6(1).
- Azza, Fatih. dkk.(2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. 4(2)
- Dewanti, Erisa Nada. dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Anwarul*. 2(4),.
- Lukitasari, Sandra Wahyu & Bambang Suteng Sulasmono & Ade Iriani.(2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*. 4(2)
- Muhamis & Fadriati.(2023) Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*. 6(1)
- Yuliah , Elih. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir*. 30(6)
- Solichin, Mujianto. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam*. 6(2)
- Kholifah, Elisa Putri & Farid Setiawan & Nurul Lahdiah Fitri. (2022) Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Al-Muaddib*, 4(2)
- Karya, Betty.(2022). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Palangkaraya: Penerbit NEM,.
- Zed, Mestika. (2014). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.